

PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM PELAYANAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEEROM (STUDI KASUS APLIKASI SAIBA DAN SAS)

ELVIRA USULU, FAISAL ABUBAKAR, CHRISTINE KARTIWA

ABSTRAK

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom adalah salah satu SKPD dalam Pemerintah Kabupaten Keerom yang menyelenggarakan program Pemerintah yaitu pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dengan target agar seluruh masyarakat Kabupaten Keerom memiliki KTP-el. Walaupun memiliki keterbatasan karena factor lokasi, kondisi wilayah dan sumber daya manusia yang kurang mendukung tetapi pelaksanaan program KTP-el ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan menunjukkan apakah manfaat yang diberikan oleh Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat dirasakan secara efektif oleh pegawai maupun masyarakat di Kabupaten Keerom.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat SIM telah dirasakan oleh pegawai dan masyarakat dan sangat membantu kelancaran pelayanan dan memiliki waktu yang singkat sehingga memudahkan dalam hal memiliki dokumen kependudukan seperti KTP-el. Semoga ke depannya program pemerintah ini dapat lebih dirasakan manfaatnya demi memajukan Kabupaten Keerom.

Kata Kunci: Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Dalam Pelayanan E-Ktp

Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom merupakan salah satu Dinas pada ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Keerom yang melaksanakan pelayanan publik yaitu pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Keerom secara langsung yang melayani tentang dokumen-dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Surat Pindah Datang, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Pernikahan, Akta Perceraian dan Akta Pengangkatan Anak. Dalam proses pelayanan dokumen-dokumen kependudukan tersebut diatas maka sangat diperlukan suatu sistem yang terintegrasi dan dapat mendukung kelancaran prosesnya. Sistem tersebut berupa beberapa aplikasi yang dapat menyimpan data base atau seluruh biodata yang tidak dapat hilang sampai kapanpun. sewaktu-waktu data tersebut dibutuhkan tidak lagi menggunakan berkas arsip yang dapat rusak terkena air, dimakan rayap dan sebagainya akan tetapi dapat dilihat dengan menginput nama, tanggal lahir dan Nomor Induk Kependudukan maka data tersebut sudah muncul dan akurat. Disinilah perlunya pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen yang dapat memperlancar proses pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom.

Tentang beberapa dokumen di atas, yang memiliki keterkaitan pada program pemerintah secara nasional dan dicanangkan pembaharuannya yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Hal ini dilakukan dalam rangka Tertib Administrasi Kependudukan. Tertib Administrasi Kependudukan diperlukan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap kepastian status pribadi dan status hukum penduduk didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan baru terbit setelah 61 tahun Indonesia Merdeka. Seharusnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 ini terbit segera setelah Indonesia merdeka, karena hal-hal yang berkaitan dengan Penduduk dan Warga Negara langsung diamanatkan oleh pasal 26 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diatur dengan undang-undang.

Sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, pengaturan tentang Administrasi Kependudukan, termasuk didalamnya pengaturan tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) diatur oleh peraturan peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia

Belanda (staatsblad) dan setingkat Peraturan Menteri. Kondisi ini dipergunakan oleh banyak pihak untuk membuat dokumen kependudukan, termasuk KTP yang identitas penduduknya tidak benar, disamping itu sangat mudah dibuat KTP ganda dan KTP palsu. Kondisi ini masih terus berjalan sampai dengan tahun 2009, meskipun setelah undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 diterbitkan, kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tetapi hal-hal mendasar dalam administrasi kependudukan belum dapat terimplementasi secara benar dan baik.

Baru setelah tersusunnya Kabinet Indonesia Bersatu II Tahun 2009 Menteri Dalam Negeri mengetahui dan memahami kerugian akibat tidak tertibnya Administrasi Kependudukan utamanya menyangkut KTP dengan identitas tidak benar, KTP palsu dan KTP ganda, maka Menteri Dalam Negeri memberanikan diri untuk mengajukan usulan 3 (tiga) Program Strategis Nasional yang meliputi : Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan KTP Elektronik (e-KTP).

Tiga program Strategis Nasional tersebut mendapat dukungan yang penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI). Untuk penerapan e-KTP Menteri Dalam Negeri memprogramkan diselesaikannya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (201-2013) guna menghentikan berbagai kerugian negara yang timbul dari tidak tertibnya administrasi kependudukan serta terbitnya KTP dengan identitas tidak benar, KTP palsu dan KTP ganda (TKI ilegal, trafficking/ perdagangan orang, terorisme dan kejahatan perbankan). Pelaksanaan Program e-KTP tersebut didukung oleh anggaran yang besar, perencanaan teknis yang matang, oleh karena itu ditargetkan selesai 3 tahun disertai dengan 3 komitmen yang tinggi dari Menteri Dalam Negeri dan jajarannya yaitu : Program e-KTP harus sukses, Tidak boleh ada kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh program e-KTP dan Dalam pelaksanaan program e-KTP tidak boleh terjadi pelanggaran terhadap hukum/ ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan diatas sangat membutuhkan suatu sistem yang mendukung kelancaran proses diatas. Maka

di bentuklah suatu sistem yang disebut Sistem Informasi Manajemen.

Sistem Informasi Manajemen atau SIM (bahasa Inggris : management information system, MIS) adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem Informasi dibedakan dengan sistem informasi biasa karena SIM digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode informasi manajemen yang bertalian dengan dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia, misalnya sistem pendukung keputusan, sistem pakar dan sistem informasi eksekutif.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) meliputi metode serta upaya yang terorganisir dalam menjalankan fungsi pengumpulan data transaksi, baik itu yang bersumber dari dalam maupun dari luar organisasi dan mempergunakan sistem yang terkomputerisasi dalam prosesnya, dengan tujuan dapat menghasilkan serta kemudian menyajikan informasi yang akurat, tepat dan up to date yang ditujukan untuk seluruh pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan manajemen organisasi.

Pada tahun 2013 sampai tahun 2016 pemerintah pusat menyelenggarakan percepatan pelayanan public khususnya pada pelayanan Kartu Identitas Penduduk Elektronik (KTP-El). Hal ini disebabkan oleh besarnya tuntutan data kependudukan Indonesia yang tidak akurat, tidak dapat mendukung berjalanya pemerintahan yang baik dan tidak dapat terdeteksi secara cepat. Oleh karena itu, Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memandatkan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendukung anggaran yang dapat mempercepat proses terselenggaranya Kartu Identitas Penduduk Elektronik di Kabupaten-kabupaten diseluruh Indonesia. Maka direalisasikan lah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan ke Kabupaten-Kabupaten di seluruh Indonesia dengan program Tugas Pembantuan (TP). APBN ini diawasi

langsung oleh Pemerintah Pusat melalui KPPN yang ada di Provinsi masing-masing.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini dikelola oleh masing-masing instansi dengan menggunakan beberapa Sistem Informasi Manajemen (SIM) salah satunya adalah Sistem Akuntansi Satker (SAS) yang digunakan untuk menghasilkan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara (LPJ). Sistem lain yang digunakan adalah Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA). Fungsi saiba adalah sebagai pengumpul data dari beberapa SAS yang dirangkum menjadi beberapa laporan keuangan. Kedua sistem ini sangat melekat pada program keuangan negara yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

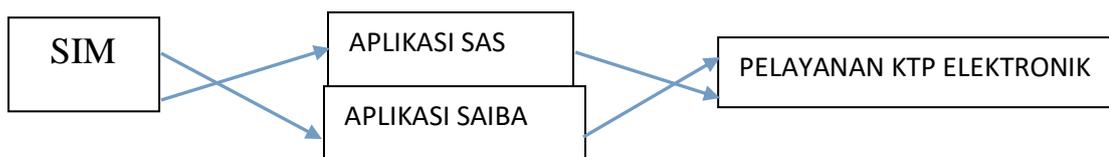
Sistem Informasi Manajemen (SIM) telah digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom sejak Dinas ini didirikan pada tahun 2010 dimana sistem pencetakan dokumen kependudukan mulai dibuat melalui sistem online dengan menggunakan beberapa aplikasi. Namun, Sistem Akuntansi Satker (SAS) dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) baru digunakan pada tahun 2014, tepatnya saat Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom. Di tahun 2014 aplikasi SAS dan SAIBA sangat membantu dalam sistem pelaporan keuangan hanya saja masih belum akurat seperti di tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh pembaharuan aplikasi secara bertahap sehingga aplikasi SAS dan SAIBA lebih baik lagi cara kerjanya dari yang dahulu digunakan. Pembaharuan - pembaharuan inilah yang menjadikan berubahnya sistem kerja baik di aplikasi maupun prosedur kerja aplikasi ini. Itulah sebabnya Sistem ini akan diteliti agar dapat mengetahui sejauh mana pemanfaatan dari aplikasi ini untuk mendukung program KTP-el sebagai program utama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana Sistem Informasi Manajemen ini dapat digunakan untuk pelayanan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom dan di manfaatkan sebagai sarana untuk memudahkan dalam pengelolaan keuangan pada satuan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom.

Kerangka Konseptual



Tipe dan Dasar Penelitian

Dalam penelitian tipe dan dasar penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2005:21) penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.. Jadi penelitian ini berusaha memberikan penjelasan tentang hubungan antara SIM dan pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom (Aplikasi SAIBA dan SAS).

Unit Analisis Data

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisa adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom.

Informan Penelitian

Informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang menjadi informan adalah :

1. Kepala Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data Base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom
2. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
3. Costumer Servis pelayanan pada Kantor KPPN wilayah Jayapura
4. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom
5. Masyarakat Kabupaten Keerom

Definisi Operasional

Sistem Akutansi Instansi Berbasis Akrual (saiba) adalah prinsip-prinsip akutansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Negara yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua Warga Negara Asing yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki KTP.

Sistem Aplikasi Satuan Kerja (SAS) adalah penggabungan dari beberapa aplikasi Satuan Kerja pada tahun 2014 menjadi satu kesatuan aplikasi yang kemudian terbagi menjadi beberapa modul. SAS ini sendiri merupakan aplikasi multi-user, sehingga dalam satu aplikasi secara sekaligus digunakan untuk beberapa user sesuai fungsi dan kewenangannya. Diah Lani Oktaviana menyampaikan bahwa SAS adalah sebuah logika berpikir aplikasi dalam rangka menyongsong SAKTI, sebuah platform sistem aplikasi yang bersifat single database yang mana akan secara online terkoneksi dengan SPAN.

Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI) adalah salah satu modul yang terdapat pada SAS, dimana user yang digunakan adalah user bendahara, baik itu bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran.

Teknis Analisis dan Pengukuran

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Teknis analisis yang digunakan adalah menggunakan Teknik analisis data deskriptif

kualitatif yaitu teknik analisis yang berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan.

Disini kita dapat melihat bahwa Sistem Informasi Manajemen yang digunakan dalam hal ini SAIBA dan SAS memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada beberapa permasalahan yang diambil dari analisis ini yaitu : Apakah SAIBA dan SAS sudah sangat tepat digunakan dalam pelaporan keuangan dalam kelancaran pelayanan e_KTP?. Apakah APBN sangat tepat untuk mendukung penyelenggaraan e-KTP?

Analisis Interpretasi Data

Sistem Akutansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Akutansi Satuan Kerja (SAS)

Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang digunakan adalah aplikasi SAIBA dan SAS dalam pengelolaan keuangan APBN. Aplikasi SAIBA dan SAS memiliki peran yang sangat penting dalam proses keuangan karena di aplikasi inilah semua rencana keuangan dan realisasinya termuat didalamnya.

Hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Costumer Service 1 Kantor KPPN wilayah Jayapura mengatakan bahwa : “Apbn diawali dengan sebuah dokumen bernama DIPA yang diterbitkan oleh pusat dan diserahkan kepada instansi yang dimaksud. Selanjutnya pemenuhan administratif di kantor KPPN berupa Specimen tanda tangan yang akan menjadi tanda tangan elektronik dalam aplikasi SAS dan SAIBA dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara. Specimen telah jadi dan dilanjutkan dengan penginstalan aplikasi SAS dan SAIBA pada laptop dan pembuatan user masing-masing user. Barulah diinput SPP,SPM dan dibackup untuk penyetoran SPM. Setelah SP2D keluar barulah penginputan pada aplikasi SAIBA dimulai dg mengimport atau merestore data dari aplikasi SAS tadi. Maka laporan akan muncul dan diprint untuk disetorkan ke bagian rekonsiliasi data. Apabila disetujui dan cocok maka keluarlah berita acara rekonsiliasi sebagai bukti pelaporan keuangan telah lengkap dan disahkan oleh hukum. Untuk lebih memahami cara kerjanya dapat dilihat pada buku panduan aplikasi”.

Sedangkan Costumer service 2 berkaitan dengan sosialisasi aplikasi mengatakan bahwa : “Aplikasi ini ada karena sistem pelaporan keuangan yang dahulu kita gunakan memiliki kelemahan yang sangat banyak. Dengan adanya aplikasi SAS dan SAIBA lebih memudahkan siapapun dalam melakukan proses keuangan yang lebih akurat. Tidak perlu membawa kertas yang banyak, langsung saja diinput dalam

aplikasi, aplikasilah yang bekerja mengolah data sehingga menjadi satu laporan yang akurat. Walaupun begitu, masih banyak kelemahan juga dalam aplikasi ini sehingga setiap waktu terjadi update versi aplikasi dengan tujuan melakukan yang lebih baik dari sebelumnya.”.

Hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) mengatakan bahwa : “ Specimen tandatangan khusus PPSPM memiliki PIN atau kode khusus untuk menginput pada saat penyetoran SPM ke loket SPM. Pin ini sangat menentukan SPM diterima dan disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. SPM tidak akan diterima oleh loket SPM apabila Pin atau kode PPSPM tidak terbuka. PPSPM memiliki jalur sendiri dalam proses pembuatan Pin atau Kode”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Aplikasi SAS dan SAIBA memiliki beberapa proses atau prosedur yang wajib dilakukan diawali dari penerimaan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) oleh Instansi dimaksud kemudian dilakukan pemenuhan prosedur administratif yaitu melengkapi Specimen Tanda Tangan yang akan digunakan sebagai Tanda Tangan elektronik dalam aplikasi SAS dan SAIBA, penginstalan aplikasi SAS dan SAIBA pada laptop yang disediakan oleh instansi. Aplikasi ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Aplikasi Sistem Akuntansi Satuan Kerja (SAS)

Aplikasi SAS terbagi menjadi beberapa modul aplikasi yaitu : a). SAS SPP digunakan untuk menginput data rencana anggaran yang akan dikeluarkan maka terbitlah Surat Perintah Pembayaran (SPP). Data rencana dimaksud adalah : Nama Satuan Kerja , Kode KPPN, Nomor dan tanggal DIPA, Nama kegiatan beserta nominal anggaran yang akan dicairkan dan Pajak yang dikenakan pada kegiatan yang dimaksud. Setelah hal-hal diatas dilakukan maka akan tersedia ikon bertuliskan SIMPAN. Setelah ikon ini di klik maka akan terbitlah SPP yang akan di backup untuk penginputan selanjutnya. b). SAS SPM digunakan untuk menginput data yang tersurat pada aplikasi SAS SPP dan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPM). Adapun proses penerbitan SPM adalah sebagai berikut :Pengisian nomor SPP dan tanggal SPP; Pengisian nominal pajak. Setelah kedua isian diatas dilakukan maka terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM). Data ini akan di backup untuk dilakukan penginputan PIN PPSPM untuk proses penyerahan SPM pada loket SPM. C). SAS LPJ digunakan untuk menginput nomor dan tanggal dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang secara otomatis menampilkan isi dari SPP dan SPM. Didalam aplikasi ini diinput pendapatan

dan pengeluaran sehingga terbitlah Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJB). Adapun isi SAS LPJ adalah sebagai berikut : Realisasi SP2D, Tanggal pelaksanaan kegiatan, Backup SPP dan SPM. Ketiga hal tersebut akan di backup dalam bentuk softcopy dan akan di store untuk kepentingan rekonsiliasi pada loket Rekonsiliasi.

Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA)

Aplikasi SAIBA memiliki fungsi sebagai aplikasi induk. Aplikasi ini memuat data aplikasi SAS yang direstorasi menjadi sebuah laporan keuangan berbasis akrua. Adapun proses penginputan sebagai berikut : Data aplikasi SAS (SPP,SPM.LPJ) di buatkan Backup data dan di Restore pada Menu sinkronisasi, Diinput nomor dan tanggal SP2D, Pada menu Laporan akan muncul beberapa laporan yang telah tersedia yang akan di Print menjadi sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan yang d print dari aplikasi SAIBA adalah laporan yang digunakan untuk melakukan Rekonsiliasi Data Satuan Kerja setiap bulannya.

Manfaat SAS dan SAIBA dalam Pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom

Setelah saya melakukan penelitian, maka didapatkan beberapa masalah berkaitan dengan pelayanan e-KTP. Mekanisme pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki e-KTP dan manfaat yang dirasakan dengan memiliki e-KTP.

Pada tahun 2013 pencapaian Wajib e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 55% atau setengah dari jumlah penduduk yang berdomisili di Kabupaten Keerom. Tercapainya 55% ini dilakukan dengan cara turun ke kampung-kampung, ke rumah-rumah penduduk dan melakukan perekaman di sana. Hasil perekaman di bawa ke Dinas kemudian dilakukan pencetakan e-KTP pada blangko yang e-KTP. Setelah dilakukan pencetakan e-KTP maka di salurkan atau dibagikan kepada masyarakat melalui para Kepala Distrik. Hal ini dirasakan kurang efektif mekanisme kerjanya karena dinilai kurang bagus oleh masyarakat. Waktu pengambilan yang terlalu lama dan sebagian data yang sudah di rekam tidak dapat diterbitkan karena alasan teknis dan alasan lain sehingga banyak masyarakat yang mengajukan protes secara langsung maupun secara lisan pada media sosial maupun surat kabar. Permasalahan ini tidak dapat diatasi langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom karena

keterbatasan anggaran yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana termuat program penataan Administrasi Kependudukan yang berisikan kegiatan Pengelolaan data SIAK dan pelaksanaan penerapan KTP-el kurang mendukung terlaksananya pelayanan yang 100 % berjalan baik. Turun kampung dilaksanakan ke setiap distrik hanya sekali saja karena anggaran yang disediakan hanya untuk sekali perjalanan, maka sangat tidak efektif dalam penerapannya. Di tahun 2014, pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom mulai ada kemajuan karena anggaran yang dahulu hanya berasal dari APBD, diberikan bantuan dari pemerintah pusat melalui Dana Pembantuan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pengelolaannya melalui SAS dan SAIBA yang difokuskan pada pelayanan dokumen kependudukan yang adil, efisien dan efektif. Dengan adanya APBN inilah kegiatan turun kampung yang dahulunya cuma sekali setiap Distrik menjadi lima kali per distrik dalam jangka waktu satu tahun. Mekanisme APBN ini juga sangatlah ketat pengawasannya sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya. Dalam APBN sangat di perhatikan proses pencairan dan proses pelaporan keuangannya. Proses ini dilakukan melalui beberapa Sistem Informasi Manajemen (SIM) yaitu Sistem Akuntansi Satuan Kerja (SAS) dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA). Dengan melaksanakan beberapa sistem ini dengan baik, maka pelayanan e-KTP juga menjadi lancar, dilihat dari proses pengadaan blangko e_KTP dan Blangko Akta-Akta, Pengadaan alat-alat perekaman, dan monitoring ke distrik-distrik yang diperbanyak pelaksanaannya sehingga sistem aplikasi SAS dan SAIBA ini sangat mempengaruhi dalam kelancaran pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom. Pencairan dana yang digunakan untuk pelaksanaan e-KTP akan berjalan lancar apabila pelaksanaan penginputan aplikasi SAS dan SAIBA sudah tepat dan akurat. Apabila pencairan dana lancar, kegiatan juga berjalan lancar sehingga mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelum adanya APBN dengan pengelolaannya melalui aplikasi SAS dan SAIBA.

Berikut adalah hasil wawancara saya kepada beberapa informan yang mewakili dari masyarakat dan pegawai. Informan 1 yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatakan “ Dengan adanya Dana Pembantuan yaitu APBN yang dikelola

menggunakan SIM yaitu SAS dan SAIBA ini pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan khususnya e_KTP yang dahulu sangat berat dirasakan karena mau turun kampung saja dihambat oleh anggaran yang tidak cukup dan proses pencairan dana yang lambat sehingga kita tidak berdaya...walaupun ada masyarakat kampung yang mengajukan permintaan perekaman di kampung mereka tetapi tidak ada dananya jadi kami diaman saja. Namun dengan adanya dana pembantuan ini dengan pengelolaan yang menggunakan aplikasi SAS dan SAIBA ini kita lebih leluasa melaksanakan pelayanan ke kampung-kampung, dikantor juga tersedia peralatan yang cukup sehingga sanga lancar kerja kita. Honorarium yang kita dapatkan juga sesuai sehingga kita jadi semangat bekerja melayani masyarakat lebih baik lagi. Aplikasi SAS dan SAIBA ini sangat memudahkan pencairan yang tidak menunda-nunda pencairan. Apabila diinput sesuai dengan aturannya maka hari ini diinput, hari ini juga keluar SP2D nya sehingga kita semangat juga melaksanakan pelayanan ini”.

Sedangkan dilain pihak dampak positif juga dirasakan oleh pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom seperti hasil wawancara dengan pegawai sebagai informan 4 mengatakan : “Teman-teman disini juga sangat senang dengan adanya APBN ini. Sistem yang digunakan sangat mudah dan transparan sehingga tidak ada lagi yang bertanya honor dibayar kapan? Jalan ke kampung kapan? Tapi bisa di upload rencana pencairan melalui aplikasi SAS dan SAIBA saja. Pengadaannya jelas dan barang-barangnya juga jelas sehingga tidak ada yang tanya-tanya lagi’ bolpen-bolpen dimana....’hal-hal inilah yang memperlancar pelayanan e-KTP di dinas ini”.

Sedangkan informan 3 lainnya mengatakan : “Mengenai aplikasi ini saya kurang begitu paham mekanisme kerjanya hanya saja saya ikut merasakan adanya keterbukaan informasi dan kejelasan anggaran yang sangat membantu kami dalam pelayanan e-KTP di dinas ini. Dulu satu distrik cuma satu kali monitoring tetapi adanya APBN ini satu distrik bisa beberapa kali sehingga saat pertama turun kampung apabila ada kekurangan dapat di lengkapi di turun kampung selanjutnya sehingga tidak terjadi salah paham seperti dulu. Masyarakat menganggap kami ingkar janji dan hanya bisa menjanjikan sesuatu yang belum tentu bisa dilakukan. Teman-teman disini juga sangat senang dengan adanya APBN ini. Sistem yang digunakan sangat mudah dan transparan sehingga tidak ada lagi yang bertanya honor dibayar kapan? Jalan ke kampung kapan? Tapi bisa di upload rencana pencairan melalui aplikasi SAS dan SAIBA saja.

Pengadaannya jelas dan barang-barangnya juga jelas sehingga tidak ada yang tanya-tanya lagi' bolpen-bolpen dimana....'hal-hal inilah yang memperlancar pelayanan e-KTP di dinas ini”.

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa kehadiran APBN yang pengelolaannya menggunakan SIM yaitu aplikasi SAS dan SAIBA sangat dirasakan manfaat dan dampak positifnya. Dimana keterbukaan informasi sangat dirasakan dan proses pencairan dana yang mudah dilakukan dan tidak menyita waktu. Kepastian pelayanan e-KTP sangat nyata terlihat karena dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan dapat diatur waktunya dilihat dari proses penginputan SPP sampai pada pencairan dananya. Informan 5 mewakili masyarakat Kabupaten Keerom mengatakan : “Sebenarnya saya sudah punya secara aturan tapi e-KTP ini bikin kita setengah mati bolak balik cek ke dinas DUKCAPIL selalu bilang belum ada blanko. Saya perekaman di kampung PUND distrik Waris dari tahun 2013 tapi dapat e-KTP yang di blanko pada tahun 2015. Tidak tahu kenapa alasan pegawai dorang tidak ada blanko jadi selama itu saya pakai surat keterangan saja. Tahun belakangan ini baru mulai lancar, mungkin mereka baru sadar terlalu banyak janji kemasyarakat yang tidak dipenuhi jadi mereka rubah pelayanan itu”.

Sedangkan informan 5 lainnya mengatakan : “Saya sudah punya e-KTP dari tahun 2016. Saya perekaman seminggunya sudah jadi. Pelayanan di Dinas DUKCAPIL ini masih lamban. Kita harus mengantri berjam-jam untuk perekaman trus waktu pengambilan juga diloket wajah petugas loket jutek-jutek. Tapi secara keseluruhan sih sudah bagus dari pada teman-teman saya yang tahun-tahun lalu perekaman, belum punya e-KTP sampai sekarang. Menurut saya, e-KTP ini sangat membantu sekali dengan proses yang online sehingga dapat mencegah kejahatan-kejahatan, memanipulasi data dan data palsu. Pada saat tetangga saya meninggal ditemukan di jalan sekali menaruh jarinya di alat langsung terdeteksi identitasnya. Sangat membantu”.

Dari hasil wawancara diatas, sangat terlihat manfaat positif yang dirasakan oleh masyarakat dimana pelayanan e-KTP yang dahulunya dirasakan sangat sulit dilakukan dan memakan waktu yang sangat lama dapat diatasi dengan adanya APBN yang pengelolaannya dilakukan menggunakan SIM yaitu aplikasi SAS dan SAIBA. Walaupun masih terdapat kekurangan dalam pelayanan e-KTP namun tetap terjadi kemajuan pelayanan. Dengan adanya SAS dan SAIBA sangat membantu kejelasan proses pelayanan e-KTP dari proses perekaman e-KTP

bisa langsung mendapatkan e-KTP yang sudah dicetak di blanko e-KTP.

Pemahaman Pegawai terhadap Aplikasi SAIBA dan SAS

Pemahaman pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom sangat minim tentang aplikasi SAIBA dan SAS hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan informan 4 yang mengatakan: “Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom sangat kurang tenaga operator yang bisa menguasai aplikasi-aplikasi. Pegawai di dini kebanyakan memiliki keahlian administratif untuk melayani hal-hal administratif seperti surat masuk, surat keluar, pelayanan loket, pengarsipan dokumen,dll. Sedangkan untuk operator sendiri cuma berapa orang saja yang bisa. Ini karena kurang adanya bimtek. Kalo banyak bimtek atau pelatihan saya rasa tenaga operator pasti banyak dihasilkan”.

Dari hasil wawancara diatas, dilihat bahwa minimnya ketersediaan operator yang memahami aplikasi-aplikasi. Sehingga yang melaksanakan aplikasi ini hanya beberapa orang yang memiliki keahlian di bidang komputerisasi dan memahami dengan cara mengikuti beberapa pelatihan/Bimbingan teknis yang diselenggarakan secara bertahap. Hal inilah yang menjadikan terhambatnya sistem kerja di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom.

Kendala dan Hal-hal yang mendukung dalam Pelaksanaan SIM

Kendala-kendala yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom memiliki beberapa hal. Hasil wawancara dengan informan 5 lainnya yang mengatakan : “bagaimana mau maju kalo keahlian tidak ada. Terkadang sudah diajarkan juga tapi masih lelet pemahamannya, kita mau bagaimana? Memeng perlu berulang-ulang kali diajarkan karena SDM nya tidak memiliki keahlian. Tambah lagi kalo jaringan sudah tidak bagus, hancur sudah...pelayanan tidak bisa jalan. Trus kalo sudah begitu kita dibilang tidak melaksanakantugas dengan baik.langsung dirusak tuh alat-alat utuk pelayanan. Jadi yah...kita mau bagaimana lagi?tapi kalo pendukung pelayanan seperti penyediaan sarana, mengadakan pelatihan dan bimtek sudah dilakukan sih..hanya saja oknumnya yangtidak serius mengikuti.sosialisasi juga sudah dilakukan tinggal dari masyarakatnya saja, mau tidak mengikuti ”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kendala yang ditemukan dalam melaksanakan pelaksanaan SIM di DiSDUKCAPIL kabupaten Keerom adalah : Sumber Daya Manusia yang

kurang memiliki keahlian khusus, Jaringan internet yang kurang mendukung dikarenakan jarak yang jangkauan internet belum bisa dicapai dan Situasi dan kondisi kemasyarakatan yang kurang memberikan dukungan (terkadang terjadi perusakan sarana komunikasi oleh orang-orang yang kurang Bertanggung jawab). Hal-hal yang mendukung dalam Pelaksanaan SIM, Tersedianya sarana untuk pelaksanaan SIM, Terlaksananya pelatihan/Bimbingan Teknis bagi pengelola SIM, Terlaksananya sosialisasi bagi pegawai dan masyarakat dalam hal mendukung pelaksanaan SIM

Pembahasan

1. Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Akuntansi Satuan Kerja (SAS)

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen dalam Pelayanan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, khususnya penggunaan aplikasi SAS dan SAIBA sudah sangat dirasakan manfaat positif oleh masyarakat maupun para pegawai yang melaksanakannya.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang digunakan adalah aplikasi SAIBA dan SAS dalam pengelolaan keuangan APBN. Aplikasi SAIBA dan SAS memiliki peran yang sangat penting dalam proses keuangan karena di aplikasi inilah semua rencana keuangan dan realisasinya termuat didalamnya. Walaupun masih saja ada kekurangan yang ditemui dan kelemahan dari aplikasi tersebut. Kekurangan dan kelemahan-kelemahan tersebut terjadi karena kurangnya sumber daya manusia yang menguasai sistem komputerisasi dan pembaharuan-pembaharuan aplikasi yang dapat merubah data valid menjadi data kosong. Hal-hal inilah yang biasanya memicu kesalahan pelaporan keuangan. Ditambah lagi dengan jaringan internet yang terkadang susah didapat dan menghambat proses keuangan yang dilaksanakan.

Aplikasi SAS dan SAIBA memiliki prosedur pelaksanaan di mulai dari penerimaan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) oleh instansi dimaksud, proses administratif di Kantor KPPN wilayah Jayapura, penginstalan aplikasi pada laptop instansi, penginputan SPP, SPM dan LPJ yang dirangkum menjadi satu laporan keuangan pada aplikasi SAIBA.

Proses penginputan juga memiliki ketentuan-ketentuan yang diatur oleh aturan yang dibuat Kementerian Keuangan. Berawal dari specimen tanda tangan oleh KPA.PPSPM dan Bendahara, dilanjutkan oleh penentuan Pin atau kode oleh PPSPM dan diterbitkan barcode untuk bendahara.

Semua proses yang dilakukan bertujuan untuk melancarkan proses pencairan dana dengan menghindari kecurangan-kecurangan yang biasa terjadi karena kurangnya pengawasan.

2. Manfaat SAS dan SAIBA dalam Pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom memiliki beberapa pelayanan dokumen kependudukan. Salah satunya adalah pelayanan e-KTP dimana pelayanan ini memiliki target yang ingin dicapai (2013 - 2016). Target yang dimaksud adalah Wajib E-KTP bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pada tahun 2013 pencapaian Wajib e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 55% atau setengah dari jumlah penduduk yang berdomisili di Kabupaten Keerom. Tercapainya 55% ini dilakukan dengan cara turun ke kampung-kampung, ke rumah-rumah penduduk dan melakukan perekaman di sana. Hasil perekaman di bawa ke Dinas kemudian dilakukan pencetakan e-KTP pada blangko yang e-KTP. Setelah dilakukan pencetakan e-KTP maka di salurkan atau dibagikan kepada masyarakat melalui para Kepala Distrik. Hal ini dirasakan kurang efektif mekanisme kerjanya karena dinilai kurang bagus oleh masyarakat. Waktu pengambilan yang terlalu lama dan sebagian data yang sudah di rekam tidak dapat diterbitkan karena alasan teknis dan alasan lain sehingga banyak masyarakat yang mengajukan protes secara langsung maupun secara lisan pada media sosial maupun surat kabar. Permasalahan ini tidak dapat diatasi langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom karena keterbatasan anggaran yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana termuat program penataan Administrasi Kependudukan yang berisikan kegiatan Pengelolaan data SIAK dan pelaksanaan penerapan KTP-el kurang mendukung terlaksananya pelayanan yang 100 % berjalan baik. Turun kampung dilaksanakan ke setiap distrik hanya sekali saja karena anggaran yang disediakan hanya untuk sekali perjalanan, maka sangat tidak efektif dalam penerapannya. Di tahun 2014, pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom mulai ada kemajuan karena anggaran yang dahulu hanya berasal dari APBD, diberikan bantuan dari pemerintah pusat melalui Dana Pembantuan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pengelolannya melalui SAS dan SAIBA yang difokuskan pada pelayanan dokumen kependudukan yang adil, efisien dan efektif.

Dengan adanya APBN inilah kegiatan turun kampung yang dahulunya cuma sekali setiap Distrik menjadi lima kali per distrik dalam jangka waktu satu tahun. Mekanisme APBN ini juga sangatlah ketat pengawasannya sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya. Dalam APBN sangat di perhatikan proses pencairan dan proses pelaporan keuangannya. Proses ini dilakukan melalui beberapa Sistem Informasi Manajemen (SIM) yaitu Sistem Akuntansi Satuan Kerja (SAS) dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Dengan melaksanakan beberapa sistem ini dengan baik, maka pelayanan e-KTP juga menjadi lancar, dilihat dari proses pengadaan blangko e_KTP dan Blangko Akta-Akta, Pengadaan alat-alat perekaman, dan monitoring ke distrik-distrik yang diperbanyak pelaksanaannya sehingga sistem aplikasi SAS dan SAIBA ini sangat mempengaruhi dalam kelancaran pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom. Pencairan dana yang digunakan untuk pelaksanaan e-KTP akan berjalan lancar apabila pelaksanaan penginputan aplikasi SAS dan SAIBA sudah tepat dan akurat. Apabila pencairan dana lancar, kegiatan juga berjalan lancar sehingga mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelum adanya APBN dengan pengelolaannya melalui aplikasi SAS dan SAIBA.

3. Pemahaman Pegawai terhadap Aplikasi SAIBA dan SAS

Agar dalam pelaksanaan pelayanan KTP Elektronik yang bisa maksimal, maka pada tahun 2017 hingga tahun ini diperlukan sejumlah penataan dan pembenahan baik pada tahap perencanaan anggaran, proses keuangan sampai pada laporan keuangan dapat berjalan lebih baik lagi. Aplikasinya dapat ditata ulang dengan versi yang lebih baik, penataan pelaporan yang lebih akurat dan akuntabilitas. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diatas pemerintah perlu menyelenggarakan Bimbingan Teknis (BIMTEK), pelatihan-pelatihan dan sosialisasi-sosialisai dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Keerom, para pegawai dan masyarakat yang terkait.

Pelatihan yang dimaksud agar dapat memajukan pelayanan karena didapati sumber daya manusia yang tidak memiliki keahlian khusus dalam hal komputerisasi. Jika pelatihan ini dilaksanakan dan diikuti dengan baik maka pemahaman yang kurang terhadap SIM dapat teratasi.

4. Kendala dan Hal-hal yang mendukung dalam Pelaksanaan SIM

Kendala-kendala yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu kurang adanya pegawai yang memahami SIM sehingga hanya beberapa pegawai saja yang ditunjuk untuk melaksanakan SIM. Hal ini diakibatkan kurangnya kesadaran diri untuk mengecap pendidikan yang tinggi sehingga sumber daya manusianya menjadi pasif.

Ketersediaan jaringan internet yang kurang bagus juga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan SIM. Dimana semua proses SIM hanya dapat dilakukan apabila jaringan internet tersedia dengan baik. Jarak yang jauh dari daerah perkotaan mengakibatkan susahnya sinyal di Kabupaten Keerom. Pihak ketiga pengadaan jaringan baru beberapa menara saja yang dibangun. Walaupun ada kemajuan dalam mengakses internet namun masih lambat karena sistem 4G belum sepenuhnya dapat di rasakan oleh pegawai khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dukungan dari masyarakat juga tidak 100% terjadi karena banyak masyarakat menilai kinerja pegawai yang kurang maksimal padahal semua tergantung pada sarana dan prasarana yang ada. Terjadilah kerusakan sarana pelayanan akibat kekecewaan masyarakat yang sudah tida terbendung lagi.

Hal-hal yang mendukung pelaksanaan SIM adalah tersedianya sarana pelayanan e-KTP yaitu, Perangkat komputer dengan kelengkapannya, server data base dengan kelengkapannya, sarana mobile keliling dan sebagainya. Dengan adanya sarana yang disiapkan maka pelayananpun menjadi lancar dan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Setelah ketersediaan sarana sudah lengkap maka pelatihan-pelatihanpun dilaksanakan agar dapat menjalankan pelayanan menggunakan sarana yang telah ada tadi. Setelah semua dilakukan dan siap melaksanakan pelayanan e-KTP, maka hal yang lain adalah sosialisasi kepada masyarakat. Dalam sosialisasi inilah tersedia informasi-informasi yang harus diketahui oleh masyarakat tentang pelayanan e-KTP. Maka pelayanan akan berjalan lancar, seimbang dan maksimal.

Dengan begitu masalah-masalah yang mendasar diatas bisa diatasi secara bertahap ke arah yang lebih baik seperti yang sudah mulai dirasakan ditahun2016.Hal ini mulai terlihat dari pelaporan keuangan yang lebih gampang dengan menggunakan aplikasi SAS dan SAIBA lebih akurat dan sangat lancar dengan tidak melupakan kelemahan-kelemahan diatas.

Semua sistem yang dibangun berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri dan dibantu oleh Kementerian Keuangan dan Aset Negara. Dalam pelaksanaan semua proses keuangan di

kantor KPPN wilayah Jayapura, Permendagri sangat mempengaruhi cikal bakalnya. Sehingga harus setiap hari online di handphone atau laptop karena permendagri selalu diperbaharui dan dilakukan revisi sehingga berakibat fatal apabila jaringan internet mengalami gangguan. Oleh karena itu disiplin waktu dan kinerja yang baik dapat menghasilkan sesuatu yang baik.

Kesimpulan

1. Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruar (SAIBA) dan Sistem Akuntansi Satuan Kerja (SAS), Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang digunakan adalah aplikasi SAIBA dan SAS dalam pengelolaan keuangan APBN sangat mendukung pelayanan e-KTP
2. Manfaat SAS dan SAIBA dalam Pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, Manfaat yang diberikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yaitu Aplikasi SAIBA dan SAS sangat bermanfaat bagi pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom dilihat dari cepatnya proses pencairan dana yang digunakan untuk mendukung pelayanan e-KTP.
3. Pemahaman Pegawai terhadap Aplikasi SAIBA dan SAS, Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom sangat minim pengetahuan tentang SAS dan SAIBA karena kurangnya kesadaran diri tentang pendidikan
4. Kendala dan Hal-hal yang mendukung dalam Pelaksanaan SIM, Kendala yang ditemukan dalam melaksanakan pelaksanaan SIM di DiSDUKCAPIL kabupaten Keerom adalah : Sumber Daya Manusia yang kurang memiliki keahlian khusus, Jaringan internet yang kurang mendukung dikarenakan jarak yang jangkauan internet belum bisa dicapai, Situasi dan kondisi kemasyarakatan yang kurang memberikan dukungan (terkadang terjadi kerusakan sarana komunikasi oleh orang-orang yang kurang Bertanggung jawab). Hal-hal yang mendukung dalam Pelaksanaan SIM adalah Tersedianya sarana untuk pelaksanaan SIM, Terlaksananya pelatihan/Bimbingan Teknis bagi pengelola SIM dan Terlaksananya sosialisasi bagi pegawai dan masyarakat dalam hal mendukung pelaksanaan SIM.

DAFTAR PUSTAKA

Ayutias. (2011). “ *Pengertian Sistem Informasi Manajemen (SIM) menurut para ahli* “. [Online]. Tersedia : <http://ayutias.blogspot.co.id> yang direkam pada 17 Mei 2011

- Bodnar, George H. dan William s. Hopwood. 2006. *System Informasi Akuntansi*, Edisi 9. Yogyakarta : ANDI
- La midjan, dan Azhar Susanto. 2000. *Sistem Informasi Akuntansi 1*, Edisi Keenam : Lembaga INformasi Akuntansi
- Narko. 2007. *System Akuntansi*, Edisi Kelima. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusantara.
- Nugroho Widjajanto. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisaksti : Erlangga
- Suwayowo. (2011). "Apa itu e-KTP dan Bagaimana cara membuatnya. [Online]. Tersedia : <http://www.suwayowo.com>. yang direkam pada 10 November 2011.
- Rendyariesta. (2011). Isu Permasalahan e-KTP. [Online]. Tersedia : <http://rendyariesta.blogspot.co.id>. Yang direkam pada 11 Oktober 2011
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2013. *Kaleidoskop Pemanfaatan e-KTP Tahun 2013*. Dirjen Kependudukan dan Cakil : Erlangga
- UJR Raymond MC leod. (1997). “ Sistem Informasi Manajemen Vers Bahasa Indonesia”. [Online]. Tersedia: <http://sisteminformasimanajemensim.blogspot.co.id>. Yang direkam pada 05 April 2017.
- Gordon B davis. (1976).” *Management Information .3System*”. Trisakti : Erlangga
- Donald W Kroeber . (1985). “*Computer-Based Information System : A Management Approach*”. [Online]. Tersedia : <http://www.amazone.com>. yang direkam pada 1 Agustus 1986
- Donald W Kroeber. (1981). “*Management Information System : A Handbook For Modern Manager*”. [Online]. Tersedia : <http://www.amazone.com>. yang direkam pada 1 Oktober 1982
- Jogiyanto Hartono. (2005). “*Analisa dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. ANDI, Yogyakarta
- Kadir A. (2003). “*Pengenalan Sistem Informasi*. ANDI, Yogyakarta
- Danu Wira Pangestu (2007). “ 1 Website 1 Juta Sedekah”. [Online]. Tersedia : <Http://bangdanu.wordpress.com>. yang direkam pada oktober 2007
- Christianto, Henry, dkk. (2007). “ *Jurnal Sistem Informasi Manajemen MTI UI Vol.3- No.2*”-Oktober2007.